

TERAPI PENYAKIT KORUPSI: PERAN PKN

Suroto

PPKn, FKIP, Universitas Lambung Mangkurat, Banjarmasin
Alamat e-mail: suroto_unlam@yahoo.com

Abstrak

Korupsi di Indonesia sudah tergolong ke dalam extra ordinary crime karena telah merusak, tidak saja keuangan negara dan potensi ekonomi negara, tetapi juga telah meluluhlantakan pilar-pilar sosio budaya, moral, politik, dan tatanan hukum serta keamanan nasional. PKN sebagai sebuah disiplin ilmu harus mampu menjembatani dan memberikan sebuah solusi dalam rangka meminimalisir persoalan korupsi di Indonesia. Solusi yang diberikan sebenarnya tidak hanya dan dapat dilakukan melalui lembaga pendidikan atau akademik saja, melainkan melainkan juga melalui wadah resmi yang berupa organisasi resmi jelmaan PKN itu sendiri.

A. Pendahuluan

Korupsi merupakan penyakit sosial yang menggerogoti sendi-sendi bangsa dan merusak tatanan hidup bernegara. Korupsi di Indonesia sudah tergolong extra ordinary crime karena telah merusak, tidak saja keuangan negara dan potensi ekonomi negara, tetapi juga telah meluluhlantakan pilar-pilar sosio budaya, moral, politik, dan tatanan hukum dan keamanan nasional. Oleh karena itu, pola pemberantasannya tidak bisa hanya oleh instansi tertentu dan tidak bisa juga dengan pendekatan parsial. Hal tersebut harus dilaksanakan secara komprehensif dan bersama-sama, oleh lembaga penegak hukum, lembaga masyarakat, dan setiap individu sebagai anggota masyarakat.

Padahal, sekitar 90% KKN yang terjadi di Indonesia disebabkan oleh sistem yang ada sangat kondusif bagi setiap orang melakukan KKN sehingga korupsi sudah merupakan sistemik. Oleh karena itu, tidak ada pilihan

lain kecuali memperbaiki sistem penyelenggaraan negara sebagaimana yang sedang dilakukan oleh KPK.

Bagi individu yang dalam kehidupan sehari-harinya selalu berinteraksi dengan uang sangatlah rentan terhadap praktik korupsi, tak terkecuali kalangan akademisi, kaum intelektual, dan kaum agamawan. Buktinya, korupsi telah merebak di kalangan-kalangan tersebut. Korupsi juga merebak di berbagai lembaga negara, pemerintah, dan juga lembaga-lembaga swasta. Kasus korupsi yang terjadi di Departemen Agama, KPU, Bank Mandiri, Pertamina, Mahkamah Agung, dan lembaga negara lainnya adalah bukti nyata bahwa penyakit korupsi telah menjalar ke mana-mana. Departemen Agama yang notabene orang-orang didalamnya adalah orang-orang yang mengerti agama, ternyata juga tidak terlepas dari dugaan praktik korupsi.

Bentuk korupsi di negara ini juga bermacam-macam, dimulai dari pungli di jalan-jalan, mark up proyek, mafia peradilan, illegal logging sampai kredit macet yang merugikan negara triliunan rupiah. Maka tak salah kalau ada yang mengatakan bahwa penyakit korupsi di negeri ini telah berkembang dalam tiga tahap, yaitu elitis, endemic, dan sistemik. Pada tahap elitis, korupsi masih menjadi patologi sosial yang khas di lingkungan para elit/pejabat. Pada tahap endemic, korupsi mewabah menjangkau lapisan masyarakat luas. Lalu tahap yang kritis, ketika korupsi menjadi sistemik, setiap individu di dalam sistem terjangkit penyakit yang serupa. Boleh jadi penyakit korupsi di bangsa ini telah sampai pada tahap sistemik. Praktek korupsi terjadi karena individu tidak mempunyai nilai-nilai moral yang dapat mencegah korupsi yang akan dilakukannya. Hal situasional seperti adanya peluang korupsi tidak akan mendukung terjadinya korupsi apabila individu memiliki nilai-nilai moral yang terintegrasi menjadi kepribadian yang kokoh.

B. Istilah Korupsi dan PKn

1. Korupsi

Korupsi dalam bahasa Latin disebut *corruptio* yang berasal dari kata kerja *corrumpere* yang bermakna busuk, rusak, menggoyahkan, memutarbalik, atau menyogok. Kalau secara harfiah korupsi merupakan perilaku pejabat publik, baik politikus politisi maupun pegawai negeri yang secara tidak wajar dan tidak legal memperkaya diri atau memperkaya

mereka yang dekat dengannya, dengan menyalahgunakan kekuasaan publik yang dipercayakan kepada mereka. Korupsi adalah perbuatan untuk mencari keuntungan pribadi atau golongan dengan merugikan kas negara.

2. PKn

Pada hakikatnya PKn merupakan suatu disiplin ilmu yang salah satu tupoksinya senantiasa berupaya melalui dunia pendidikan dalam bentuk mata pelajaran (tingkat sekolah) dan dalam bentuk mata kuliah (tingkat perguruan tinggi) untuk mempersiapkan warga masyarakat mampu berfikir kritis dan bertindak demokratis melalui aktifitas menanamkan kesadaran kepada generasi baru untuk senantiasa bersikap kritis, inovatis, ilmiah, dan religius.

C. Penyebab Korupsi di Indonesia

Berdasarkan pengalaman dan realita yang terjadi setidaknya ada delapan penyebab terjadinya korupsi di Indonesia:

1. Sistem penyelenggaraan negara yang keliru

Sebagai negara yang baru merdeka atau negara baru berkembang, seharusnya prioritas pembangunan seharusnya prioritas pembangunan di bidang pendidikan. Tetapi selama puluhan tahun mulai dari orde lama, orde baru sampai orde reformasi, pembangunan difokuskan di bidang ekonomi. Padahal setiap negara yang baru merdeka terbatas dalam memiliki SDM, uang, manajemen dan teknologi. Konsekuensinya,

semuanya didatangkan dari luar negeri yang pada gilirannya akan menghasilkan atau munculnya perilaku atau penyakit korupsi atau penyebab korupsi yang kedua.

2. Kompensasi PNS yang masih rendah

Wajar saja negara yang baru merdeka belum memiliki uang yang cukup untuk membayar kompensasi yang tinggi kepada pegawainya. Tetapi disebabkan prioritas pembangunan di bidang ekonomi sehingga secara fisik dan kultural melahirkan pola konsumerisme, sehingga sekitar 90% PNS melakukan KKN. Baik berupa korupsi waktu, melakukan kegiatan pungli maupun mark up kecil-kecilan demi menyeimbangkan pemasukan dan pengeluaran pribadi/keluarga.

3. Pejabat yang serakah

Pola hidup konsumerisme yang dilahirkan oleh sistem pembangunan seperti di atas mendorong pejabat untuk menjadi kaya secara instant. Lahirlah sikap serakah di mana pejabat menyalahgunakan wewenang dan jabatannya, melakukan mark up proyek-proyek pembangunan, bahkan berbisnis dengan pengusaha, baik dalam bentuk menjadi komisaris maupun sebagai salah seorang share holder dari perusahaan tertentu.

4. Law Enforcement tidak berjalan

Disebabkan para pejabat serakah dan PNS-nya KKN karena gaji yang tidak cukup, maka boleh dibilang penegakan hukum tidak berjalan hampir di seluruh lini

kehidupan, baik di instansi pemerintahan maupun di lembaga kemasyarakatan karena segala sesuatu diukur dengan uang. Lahirlah kebiasaan plesetan kata-kata seperti KUHP (Kasih Uang Habis Perkara), Tin (Ten persen), Ketuhanan Yang Maha Esa (Keuangan Yang Maha Kuasa), dan sebagainya.

5. Hukuman yang ringan terhadap koruptor

Disebabkan law enforcement tidak berjalan di mana aparat penegak hukum bisa di bayar, mulai dari polisi, jaksa, hakim dan pengacara, maka hukuman yang dijatuhkan kepada para koruptor sangat ringan sehingga tidak menimbulkan efek jera bagi koruptor. Bahkan tidak menimbulkan rasa takut dalam masyarakat sehingga pejabat dan pengusaha tetap melakukan proses KKN.

6. Pengawasan yang tidak efektif

Dalam sistem manajemen yang modern selalu ada instrumen yang disebut internal control yang bersifat in build dalam setiap unit kerja, sehingga sekecil apapun penyimpangan akan terdeteksi sejak dini dan secara otomatis pula dilakukan perbaikan. Seperti kita masuk lift di mana tiba-tiba terdengar bunyi alarm. Itu berarti, penumpang melebihi kapasitas lift sehingga harus ada yang keluar dari lift baru pintu lift bisa tertutup. Internal control di setiap unit tidak berfungsi karena pejabat atau pegawai terkait ber-KKN. Konon, untuk mengatasinya dibentuklah Irjen dan Bawasda yang bertugas melakukan internal audit. Malangnya, sistem besar yang disebutkan di butir 1 di

atas tidak mengalami perubahan, sehingga Irjen dan Bawasda pun turut bergotong royong dalam menyuburkan KKN.

7. Tidak ada keteladanan pemimpin

Ketika resesi ekonomi tahun 1997 keadaan perekonomian Indonesia sedikit lebih baik dari Thailand. Namun, pemimpin di Thailand memberi contoh kepada rakyatnya dalam pola hidup sederhana dan satunya kata dengan perbuatan, sehingga lahir dukungan moral dan material dari anggota masyarakat dan pengusaha. Dalam waktu yang relatif singkat, Thailand telah mengalami recovery ekonominya. Di Indonesia, tidak ada pemimpin yang bisa dijadikan teladan, maka bukan saja perekonomian negara yang belum recovery bahkan tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara makin mendekati jurang kehancuran.

8. Budaya masyarakat yang kondusif KKN

Dalam negara agraris seperti Indonesia, masyarakat cenderung paternalistic. Dengan demikian, mereka turut melakukan KKN dalam urusan sehari-hari, seperti pengurusan KTP, SIM, STNK, PBB, SPP, pendaftaran anak ke sekolah atau universitas, melamar kerja, dan lain-lain. Karena meniru apa yang dilakukan oleh pejabat, elit politik, tokoh masyarakat, pemuka agama, yang oleh masyarakat diyakini sebagai perbuatan tidak salah.

Praktek korupsi terjadi karena adanya motif-motif tertentu dari sipelaku. Beberapa motif di bawah ini biasanya mendasari para pelakunya, antara lain:

1. Keinginan untuk menumpuk harta sebanyak-banyaknya (materialisme).
2. Keinginan untuk memenuhi seluruh kebutuhannya (konsumerisme).
3. Takut terhadap kemiskinan.
4. Ingin cepat kaya dalam waktu cepat.

Motif-motif di atas timbul karena pelaku tidak bisa manajemen gejala jiwa yang ada padanya. Kondisi-kondisi jiwa di bawah ini ditenggarai menjadi katalisator praktek-praktek korupsi, antara lain:

1. Mengikuti nafsu keserakahan (tamak) terhadap harta.
2. Mendewakan kehidupan dunia (hedonis).
3. Panjang angan-angan.
4. Lalai dari pengawasan sang pencipta (ghaflah).
5. Hilangnya sifat jujur dan malu pada pelakunya.

Korupsi yang terjadi di Indonesia dilihat dari modus operandinya dapat digolongkan ke dalam beberapa kelompok sebagai berikut:

1. Suap menyuap di berbagai sektor, antara lain berupa mafia peradilan, suap menyuap dalam proses rekrutmen Pegawai Negeri Sipil (PNS), tender, dan lain-lain.
2. Pungutan-pungutan liar (pungli) disegala sektor publik.
3. Mark up (pembelegungan) dana pada berbagai proyek.

D. Motif Perilaku Korupsi

4. Kredit macet dan pembobolan pada lembaga perbankan.
5. Penggelapan uang negara.

E. Metode Pengintegrasian Nilai Moral

Metode untuk mengintegrasikan moral pada tiap individu dapat dilakukan dengan tiga pendekatan, yaitu:

1. Pendekatan rasionalistik

Pendekatan ini dilakukan dengan cara menanamkan moral dengan konsep-konsep yang bersifat rasional, misalnya dengan menanamkan pola pikir bahwa korupsi merupakan perbuatan yang merusak dan menghancurkan diri, lingkungan, dan negara. Dengan pendekatan ini akan tertanam pada individu bahwa korupsi merupakan perbuatan yang harus dihindarkan dalam dirinya. Model pendekatan seperti ini ada di negara-negara Barat modern dan bersitemkan demokrasi. Mereka tidak melakukan praktek korupsi bukan karena takut kepada Tuhan dan neraka, tetapi secara rasional mereka menyadari bahwa korupsi akan menghancurkan mereka dan negaranya.

2. Pendekatan Spiritualistik

Pendekatan ini dilakukan dengan cara menanamkan moral dengan konsep-konsep yang bersifat spiritual, yaitu dengan menanamkan rasa takut kepada Tuhan dan azab-Nya. Dengan pendekatan ini akan diperoleh individu yang takut kepada Tuhan dan azab-Nya, sehingga dirinya dapat menghindari untuk melakukan praktek korupsi.

3. Pendekatan Kombinasi antara Rasionalistik dan Spiritualistik

Pendekatan ini dilakukan dengan cara menggabungkan pendekatan rasionalistik dengan pendekatan spiritualistik secara bersamaan, yakni di samping menggunakan cara-cara yang rasionalistik, juga menggunakan metode-metode spiritualistik.

Dari tiga pendekatan di atas, menurut Rafi (2006) bahwa pendekatan rasionalistik tidak cocok diterapkan pada sebagian individu di Indonesia. Hal tersebut dikarenakan korupsi juga marak dilakukan oleh kalangan akademisi dan cendekiawan yang banyak diantara mereka yang berpendidikan pasca sarjana. Padahal, kalangan-kalangan tersebut merupakan orang-orang yang mempunyai pola pikir yang rasional. Maraknya mafia peradilan, serta kasus-kasus lainnya semakin membuktikan hal tersebut. Mereka yang terlibat dalam kasus-kasus tersebut adalah orang-orang yang berpendidikan tinggi. Minimal pendidikan mereka adalah sarjana strata satu.

Penyebab maraknya praktik korupsi pada kalangan akademisi dan cendekiawan menurut Rafi (2006) ada dua hal, yakni:

1. Gagalnya sistem pendidikan nasional. Pendidikan nasional belum mampu membentuk individu-individu yang rasional yang mampu mencegah praktik korupsi dalam dirinya.
2. Karakter masyarakat Indonesia yang tidak rasionalistik, sehingga walaupun ditanamkan pola pikir yang rasional tetap saja mereka melakukan praktek korupsi.

F. Terapi (Pengobatan) Penyakit Korupsi

Terapi atau pengobatan penyakit korupsi menurut Rafi (2006) dapat dilakukan melalui beberapa cara sebagai berikut:

1. Memulai kehidupan dengan niat yang ikhlas.
2. Menyikapi kehidupan dunia berdasarkan ajaran Tuhan.
3. Mengendalikan nafsu syahwat terhadap harta.
4. Menjaga pikiran yang terlintas untuk bermaksiat.
5. Tawakal (berserah diri kepada Tuhan).
6. Mensyukuri nikmat harta yang ada padanya.
7. Sabar menghadapi kemiskinan dan fitnah (ujian) harta.
8. Ridha terhadap ketetapan (qadha) dari Tuhan.
9. Menumbuhkan rasa takut kepada Tuhan.
10. Membentuk sifat jujur dalam diri.
11. Menumbuhkan sifat malu untuk berbuat maksiat.
12. Muhasabah (introspeksi diri).
13. Maraqqabbatullah (merasakan keagungan Tuhan YME di setiap waktu dan keadaan serta merasakan kebersamaan-Nya di kala sepi maupun ramai, di kala sendiri maupun beramai-ramai).
14. Menumbuhkan kecintaan kepada Tuhan.
15. Taubat (bertaubat untuk tidak melakukan praktik korupsi).

G. Peran PKn dalam Mewujudkan Negara yang Bersih dari Korupsi (Sebuah Filosofi Pragmatis)

1. PKn harus memaksimalkan pendidikan anti korupsi di setiap sekolah.
2. PKn harus mampu keluar dari paradoks yang membatasi diri hanya sebagai mata pelajaran dan mata kuliah di perguruan tinggi sehingga tidak mampu berbuat banyak dalam dunia praksis.
3. PKn juga harus mampu menjadi sebuah lembaga idealis dan smart yang mampu didengar suaranya dan melaksanakan pembinaan terhadap qolbu / karakter bangsa. Secara kontinu dan berkelanjutan (rintisan Asosiasi PKn).
4. PKn, pemerintah dan lembaga-lembaga keagamaan harus saling bersinergi dalam rangka melakukan pembinaan akhlak bangsa menuju Indonesia yang bersih dan berwibawa secara kontinyu.

H. Kesimpulan

Peran PKn dalam meminimalisir penyakit korupsi yang terjadi di Indonesia dapat dilakukan melalui:

1. PKn harus memaksimalkan pendidikan anti korupsi di setiap sekolah.
2. PKn harus mampu keluar dari paradoks yang membatasi diri hanya sebagai mata pelajaran dan mata kuliah di perguruan tinggi sehingga tidak mampu berbuat banyak dalam dunia praksis.
3. PKn juga harus mampu menjadi sebuah lembaga idealis dan smart yang mampu didengar suaranya dan melaksanakan

pembinaan terhadap qolbu/karakter bangsa. Secara kontinu dan berkelanjutan (rintisan Asosiasi PKn).

4. PKn, pemerintah dan lembaga-lembaga keagamaan harus saling bersinergi dalam rangka melakukan pembinaan akhlak bangsa menuju Indonesia yang bersih dan berwibawa secara kontinyu.

I. Daftar Pustaka

Budi, Johan, dkk. (2007). *Menyalakan Lilin di Tengah Kegeleapan*. Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Kalidjernih, Freddy K. (2010). *Puspa Ragam Konsep dan Isu Kewarganegaraan: Edisi Kedua*. Bandung: Widya Aksara Press.

Lubis, Muchtar dan Scott, James C. (1987). *Mafia dan Korupsi Birokratis*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.

Rafi, Abu Fida Abdur. (2006). *Terapi Penyakit Korupsi dengan Tazkiyatun Nafs (Penyucian Jiwa)*. Jakarta: Republika.

Sumantri, Endang. (1993). *Pendidikan Moral: Suatu Tinjauan dari Sudut Konstruksi dan Proposisi*. Bandung: Tidak diterbitkan.

Sumantri, Endang. (2008). *An Outline Citizenship and Moral Education in Major Countries of Southeast Asia*. Bandung: Bintang Warliartika.

Suryadi, Ace. (2009). *Mewujudkan Masyarakat Pembelajar Konsep, Kebijakan dan Implementasi*. Bandung: Widya Aksara Press.

Sagala, Syaiful dan Gultom, Syawal (Editor). (2011). *Praktik Etika Pendidikan di Seluruh Wilayah NKRI: Langkah Utama Membasmi Sifat Korup dan Keterpurukan Bangsa Indonesia, Membangun Karakter Jujur, Disiplin dan Tanggung Jawab Generasi Muda*. Bandung: Alfabeta.

Wahab, Abdul Aziz dan Sapriya. (2011). *Teori & Landasan Pendidikan Kewarganegaraan*. Bandung: Alfabeta.

Winataputra, Udin S. (2012). *Pendidikan Kewarganegaraan dalam Perspektif Pendidikan untuk Mencerdaskan Kehidupan Bangsa: Gagasan, Instrumentasi, dan Praksis*.

Winataputra, Udin S. dan Budimansyah, Dasim. (2007). *Civic Education Konteks Landasan, Bahan Ajar dan Kultur Kelas*. Bandung: Sekolah Pasca Sarjana Program Studi Pendidikan Kewarganegaraan UPI Bandung.

Winataputra, Udin S. dan Budimansyah, Dasim. (2012). *Pendidikan Kewarganegaraan dalam Perspektif Internasional: Konteks, Teori, dan Profil Pembelajaran*. Bandung: Widya Aksara Press.